

MEMBANGUN HARMONI MELALUI PENYULUHAN AGAMA

Muhammad Dachlan

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar
Email : muhdaclan1970@gmail.com

Abstrak

Penyuluh agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam membangun harmoni di masyarakat memiliki peran penting. Melalui penelitian kualitatif di Kabupaten Mamuju Utara, diperoleh tiga temuan sebagai berikut. Pertama, model penyuluhan secara moderat oleh penyuluh agama Islam, terbukti dapat meningkatkan kerukunan di masyarakat. Kedua, metode kasih dalam ajaran Kristen, mampu menjalin umat kristiani mengembangkan diri di tengah masyarakat muslim secara wajar. Sedangkan dalam agama Hindu, model untuk membangun kerukunan adalah dengan melaksanakan Tri Hita Kirana, yakni hubungan kepada Tuhan, manusia, dan alam. Melalui ketiga model tersebut, kerukunan akan dapat tercapai jika antarumat beragama mengedepankan sikap saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Kerukunan, Toleransi, Umat Beragama

PENDAHULUAN

Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membangun kerukunan umat beragama di masyarakat. Penyuluh agama selaku organ Kementerian Agama memiliki peran strategis untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara harmonis, toleran dan saling menghargai satu sama lain. Peran tersebut selaras dengan tujuan penyuluhan agama agar setiap warga negara dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan disertai wawasan multikultur (Romzan Fauzi dkk, 2014:4).

Penyuluh agama menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 1999 adalah pegawai negeri sipil yang

diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 1999).

Selain penyuluh agama yang memiliki status sebagai penyuluh agama PNS, di Indonesia terdapat penyuluh agama non PNS atau penyuluh agama honorer (rohaniwan). Penyuluh agama di Indonesia yang berstatus PNS berdasarkan data Kementerian Agama RI berjumlah 5.846 (Pusat layanan data Kementerian Agama RI, 2013).

Jumlah penyuluh tersebut merupakan jumlah total dari semua penyuluh agama, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Secara rinci jumlah dari

masing-masing penyuluh agama berstatus PNS adalah sebagai berikut : penyuluh agama Islam berjumlah 5.041, Kristen 329, Katolik 242, Hindu 182, dan penyuluh agama Budha berjumlah 52. Sementara untuk penyuluh agama Khonghucu yang berstatus sebagai PNS belum ada.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, bahasa, merupakan kekayaan yang tak ternilai. Kekayaan tersebut perlu dirawat, dibina dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sinilah salah satu peran penyuluh agama untuk melakukan bimbingan, pembinaan di masyarakat sesuai dengan adat dan budaya lokal masyarakat setempat.

Tulisan ini secara khusus membahas peran penyuluh agama di Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian tentang penyuluh agama sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, akan tetapi yang mengkaji secara khusus tentang peran penyuluh agama Islam, Kristen, dan Hindu dalam membina kerukunan umat beragama belum banyak dilakukan. Artikel yang ditulis Mas'udi tentang penyuluh dan konselor, diperoleh benang merah bahwa, antara penyuluh dan konselor memiliki ruang lingkup yang berbeda namun berdekatan. Penyuluhan yang dilakukan penyuluh agama lebih menitikberatkan kepada aspek *intrinsic* dai, sementara konselor lebih mengisyarat kepada nilai-nilai *extrinsic* para dai (Mas'udi, 2012:115).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Kustini dan Koeswinarno diperoleh temuan; Pertama, bahwa model komunikasi yang dikembangkan oleh penyuluh agama PNS masih bersifat *face to face*; kedua, pendekatan terhadap kelompok binaan masih sangat terbatas pada kelompok-kelompok religius (Kustini dan Koeswinarno, Volume 22 Nomor 2 Desember 2015., h. 173)

Penyuluh agama PNS dalam segi kesejahteraan, telah di gaji oleh negara, sementara rohaniwan (penyuluh agama non PNS) yang secara suka rela membina umat, dalam hal kesejahteraan dirasa kurang mendapat penghargaan dari masyarakat atau pemerintah. Hal ini berbeda dengan seorang konselor/motivator yang dalam kesejahteraan jauh lebih sejahtera. Sebagai contoh adalah Ary Ginanjar seorang tokoh ESQ yang memiliki kreatifitas dalam dakwah dan dalam hal kesejahteraan dimungkinkan sudah sangat mapan. Terkait dengan hal ini, menurut Munawar perlu adanya evaluasi bersama agar program-program yang dibuat tidak monoton dan tujuan yang diinginkan tercapai dalam berdakwah (Haris Munawar, 2017:h. 24).

Penelitian yang dilakukan BalaLitbang Agama Makassar tahun 2009, 2010, dan tahun 2012, diperoleh temuan bahwa model-model pembinaan yang diberikan masih cenderung bersifat konvensional, dengan muatan materi yang bersifat normatif dan eskatologis (Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar, 2012). Sementara itu, Hasibuan mengemukakan perlu adanya manajemen pemberdayaan Majelis Taklim dalam rangka pembinaan dakwah Islam di suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Titik perbedaannya adalah penelitian ini memotret peran penyuluh agama dalam meningkatkan kerukunan umat beragama dalam perspektif tiga agama yakni dalam pandangan penyuluh agama Islam, Kristen, dan Hindu di Mamuju Utara.

Tinjauan Pustaka

Untuk memahami konsep penyuluh agama sebagaimana yang diatur dalam KMA Nomor 516 Tahun 2003 tentang "Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya”, diketahui bahwa tugas penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Kegiatan kepenyuluhan adalah *pertama*; melakukan persiapan, meliputi a) identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran, b) menyusun rencana kerja, c) menyusun program kerja; *kedua*, menyusun materi bimbingan baik secara tertulis (naskah, leaflet, slide, poster, booklet) atau rekaman (kaset, video); *ketiga*, melaksanakan kegiatan pembimbingan dan penyuluhan (melalui tatap muka, melalui media, atau pentas pertunjukan) atau melakukan konsultasi keagamaan baik perorangan maupun kelompok; *keempat*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan. (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 1999)

Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya pada pasal 1 disebutkan: “Penyuluhan agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional” (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54 tahun 1999).

Menurut M. Arifin penyuluhan agama adalah: “Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap

kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa” (M, Arifin, 1999: 44).

Penyuluh agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masyarakat, harus memenuhi kualifikasi tertentu. Berikut ini adalah beberapa kualifikasi penyuluh yang harus dipenuhi oleh penyuluh agama. Kualifikasi tersebut adalah : 1) memiliki kompetensi administrasi; 2) memiliki kompetensi perencanaan program; 3) memiliki kompetensi pelaksanaan program; 4) memiliki kompetensi pengajaran; 5) memiliki kompetensi komunikasi; 6) memiliki kompetensi pemahaman perilaku manusia; 7) memiliki kompetensi memelihara profesionalisme; dan 8) memiliki kompetensi evakuasi.

Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di Indonesia, yakni hubungan harmonis antar umat beragama, antara umat yang berlainan agama dan antara umat beragama dengan pemerintah dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat sejahtera lahir dan batin (Departemen Agama, 1982)

Dengan demikian kerukunan hidup beragama menunjukkan pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama yang rukun, saling menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar dan semua persoalan dapat diselesaikan sebaik-baiknya dan tidak mengganggu kerukunan hubungan antarumat beragama pada suatu daerah tertentu (Ali, Mursyid, 2009:6).

Perwujudan sikap toleransi dalam beragama dapat dicirikan dengan beberapa indikasi. Indikator-indikator sikap toleransi tersebut adalah adanya penerimaan terhadap

kelompok lain untuk hidup bersama, terciptanya ruang dialog antar umat beragama, dan saling menghargai terhadap aktivitas keberagamaan pemeluk agama lain (Mulyadhi Kartanegara, 2005:207-210).

Pemerintah sebenarnya telah mengatur hubungan dan kerukunan umat beragama tersebut sejak akhir tahun 70-an, yakni pada masa Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (1978-1984). Pemerintah menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kerukunan intern umat beragama; 2) Kerukunan antar umat beragama; dan 3) Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. (Departemen Agama: 1982)

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi masalah penelitian secara mendalam melalui deskripsi yang bersifat kritis-konstruktif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah: wawancara, observasi lapangan, dan pemanfaatan dokumen tertulis maupun gambar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah; penyuluh agama baik yang berstatus PNS maupun non PNS, Pejabat terkait di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat yang menjadi binaan penyuluh agama.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kritis. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang relevan.

PEMBAHASAN

Potret Kerukunan Umat Agama di Kab. Mamuju Utara

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mamuju Utara, termasuk dalam kategori damai dan tidak pernah ada konflik atau kerusuhan antar umat beragama di wilayah tersebut. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan semua penyuluh agama yang ada di Kemenag Kab. Mamuju Utara yang berlokasi di Kecamatan Pasangkayu dan juga pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Mamuju Utara.

Suku yang paling dominan di wilayah ini adalah Mamuju dikatakan pula sebagai orang Baras ada orang Mandar, Jawa, Bugis, dan kelompok suku lainnya. Mereka semua hidup rukun dan damai sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia dan masyarakat Mamuju Utara. Kerukunan umat beragama tergambar dari wawancara dengan penduduk setempat berikut ini.

“Salah satu contoh adalah desa Makmur Jaya, di desa ini sebuah perusahaan yang bergerak di sektor tertentu di Kota Pasangkayu dimana pihak perusahaan melakukan jaminan yang baik terhadap kerukunan antar umat beragama. Pihak perusahaan memberi jaminan bus antar jemput majelis taklim, dan membangun masjid. Di ini ada 6 (Enam) kampung yang jaraknya saling berjauhan bila umat muslim mengadakan pengajian yang sekali dalam sebulan maka pihak perusahaan memfasilitasi bus bagi jamaah muslim demikian pula terhadap agama lain juga di fasilitasi bila mempunyai kegiatan keagamaan.” (Wawancara Penyuluh Agama Islam, Kecamatan Pasangkayu, Taskiyah)

Salah satu faktor yang membuat Mamuju Utara rukun, secara umum karena mayoritas penduduknya beragama Islam berhaluan moderat. Kelompok keagamaan di wilayah ini didominasi organisasi DDI (Darul Dakwah wal Irsyad). Islam yang diperankan

di wilayah ini adalah Islam moderat dengan mengedepankan aspek perdamaian antar umat. Organisasi keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, dan DDI senantiasa berupaya menjaga persatuan dan kesatuan umat. Melalui jalur pendidikan yang diupayakan NU, Muhammadiyah, dan DDI, pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun kerukunan.

Organisasi lain yang ada adalah LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Organisasi ini dulunya dikenal sebagai lembaga bagi orang-orang Islam Jamaah. Berikut adalah keterangan penyuluh agama tentang keberadaan LDII.

“Kalau kita bertamu ke rumah mereka suka dilap bekas tempat duduk kita karena dianggap bernajis. Tetapi sejak tahun 2005, sudah menjadi LDII. Mereka sudah tidak eksklusif tapi juga bergaul dengan baik. Itulah sebabnya, LDII juga bisa aktif dan berkembang di Mamuju Utara khususnya di Pasangkayu. Sebagian anggotanya berasal dari Jawa. Mereka sudah punya satu masjid untuk pembinaan. Beberapa tahun terakhir ada juga organisasi baru bernama Wahda Islamiyah, cuman belum terlalu nampak perkembangannya. Wahda Islamiyah ini adalah organisasi yang cukup pesat perkembangannya di Sulawesi Selatan. Dia dibawa oleh seorang aktifisnya ke Mamuju Utara, kegiatannya masih seputar ceramah-ceramah agama tetapi belum terlalu aktif di banding dengan LDII.”

(Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam, Kecamatan Pasangkayu, Taskiyah)

Selain karena dipengaruhi oleh mayoritas Islam yang berpaham moderat, kerukunan antar umat beragama di Mamuju Utara terjadi juga dipengaruhi karena sikap terbuka Suku Baras sebagai suku lokal di Mamuju Utara. Mereka menerima dengan baik kehadiran orang-orang Bugis dan Jawa. Prinsip budaya dari nenek moyang mereka memang menganjurkan untuk saling

menghargai setiap orang yang ingin hidup dan menetap.

Peran lembaga lain yang turut serta dalam pembinaan kerukunan adalah FKUB. Kehadiran FKUB dua tahun terakhir ikut pula memperkuat kerukunan yang sudah terjaga sejak lama di Kab. Mamuju Utara. FKUB adalah organisasi pemerintah memang dimaksudkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Satu kasus yang pernah ditangani adalah tentang pendirian gereja yang tidak disetujui oleh warga.

Berikut adalah penuturan penyuluh agama Hindu tentang penolakan sebuah gereja.

Gereja yang ditolak warga, alasannya adalah tidak ada warga Kristen di sekitar itu. Sebagai orang Hindu yang bertetangga dengan tanah gereja ikut menolak, Karena menurutnya kehadiran gereja di tempat itu suatu saat bisa memicu persoalan karena tidak ada warga Kristen di daerah tersebut. Akhirnya gereja itu pun tidak jadi pembangunannya dan sampai saat ini tidak ada kabar lagi dari pihak gereja apakah akan meneruskan atau tidak.” (Wawancara Penyuluh Agama Hindu).

Kerukunan dalam Perspektif Penyuluh Agama

Terkait dengan kondisi penyuluh agama berstatus PNS di Mamuju Utara, tentu kurang berimbang dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Jumlah penyuluh PNS yang ada di Kab. Mamuju Utara sebanyak 3 orang. Satu orang penyuluh agama Islam, satu orang penyuluh agama Hindu, dan satu orang lagi penyuluh agama Kristen yang saat statusnya masih sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Penyuluh agama Islam berjenis kelamin perempuan dan berlatar belakang organisasi DDI.

Kemudian untuk penyuluh agama Islam Non PNS berjumlah 56 orang. Kelompok penyuluh PNS ini merupakan tokoh-tokoh agama setempat, mereka adalah para

muballig, guru ngaji, dan juga guru madrasah. Latar belakang para penyuluh Non-PNS ini adalah dari DDI, NU dan Muhammadiyah sebagai penyuluh Islam di masyarakat. Mereka diberi insentif bulanan dari pemerintah sebagai penghargaan atas jasanya itu.

Penyuluh Hindu berasal dari aliran Hindu Dharma Siwa Sedante. Inti dari ajaran aliran Hindu Dharma adalah mengajarkan kebaikan antar sesama. Menurut penyuluh Hindu, ada nama konsep dalam agama Hindu yang disebut *tap wam asi*, aku adalah kamu. Artinya, semua manusia itu sama. Di dalam diri kita ini berasal dari unsur yang serupa yaitu unsur yang berasal dari Sang Hyang Widi. Umat Hindu dimana-mana pasti punya sifat utama saling menghargai antar sesama makhluk Tuhan.

Sedangkan penyuluh Kristen berasal dari Gereja Toraja. Menurut penyuluh Kristen, inti dari ajaran agama Kristen itu adalah kasih. Ajaran ini, tidak terkait kepada umat Kristen secara internal saja tetapi juga mencakupi keseluruhan umat. Walaupun memang harus diakui terdapat banyak denominasi dalam kristen. Aliran yang berkembang di Kabupaten Mamuju Utara adalah aliran Karismatik.

Dalam membangun kerukunan umat beragama, tentu terdapat pula faktor-faktor yang dapat menghambat program tersebut. Di antara faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama adalah : perselisihan dalam pendirian tempat ibadah, masalah penyiaran agama, terkait bantuan luar negeri, faktor perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, dan kegiatan aliran sempalan.

Terkait dengan beberapa faktor yang dapat menghambat harmonisasi di masyarakat, maka pemerintah memiliki peran

penting untuk berperan aktif membina kerukunan tersebut. Kerukunan umat beragama mutlak sangat diperlukan, agar warga masyarakat dapat menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat khususnya di Mamuju Utara ini dengan damai dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang dengan penuh kedamaian ini menjadi kunci untuk ikut serta dalam melaksanakan program kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan dengan kerja sama antar agama.

Secara kasatmata pemimpin agama berperan penting merancang dan melaksanakan dialog intern umat beragama, antarumat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Oleh karena itu keterlibatan mereka dalam penyusunan regulasi kerukunan umat beragama dan juga penegakan hukum sangat penting. Penyusunan regulasi kerukunan umat beragama oleh pemerintah dengan tidak melibatkan para pemuka tokoh agama untuk melahirkan regulasi yang hampa dan tidak bermakna, Regulasi yang dilahirkan akan bekerja bagaikan robot mekanik yang tidak mempunyai jiwa kemanusiaan, penegakan hukum yang dilakukan juga dirancang dengan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri menduduki posisi yang penting dan sangat menentukan dalam sosialisasi atau diseminasi regulasi kerukunan umat beragama ini. Kementerian ini dengan mengikutsertakan *stakeholders* harus terus membuka mata dan memperhatikan masalah-masalah kehidupan umat beragama, baik yang berskala kecil maupun besar.

Kebijakan pemerintah yang mengatur pembinaan kerukunan hidup umat beragama sudah banyak, misalnya mengenai kebijaksanaan penyiaran agama, pendirian

dan penggunaan rumah ibadah, upacara hari besar keagamaan, hubungan antar agama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah, dan wadah musyawarah antarumat beragama.

Pemberdayaan kelembagaan Islam untuk meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama perlu diprogramkan terencana dan berkelanjutan, yang diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa untuk suksesnya pembangunan nasional.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk pemerintah pada setiap provinsi, kabupaten, dan kota perlu dioptimalkan peran fungsinya dalam memupuk persaudaraan bangsa. Kegiatan FKUB jangan hanya terjebak dalam kegiatan birokrasi administrasi pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah. Karena dalam kenyataannya, badan ini menjelma hanya menjadi pengawas berdirinya rumah ibadah. Pemerintah dapat berperan dengan terus memacu dan juga memfasilitasi FKUB dalam melakukan dialog-dialog keagamaan. Dialog-dialog yang dilakukan oleh FKUB hendaknya tidak hanya merupakan dialog ‘mulut’ semata, tetapi juga harus diwujudkan dengan dialog karya nyata yang manfaatnya bisa dirasakan oleh komunitas masyarakat secara langsung. FKUB dapat melakukan kegiatan bakti sosial bersama-sama lintas agama dengan dukungan fasilitasi penuh dari pemerintah.

Tantangan pemerintah untuk membangun kerukunan di masyarakat, tidak dapat berjalan secara sepihak, artinya hanya

dilakukan oleh Kementerian Agama saja, akan tetapi seluruh komponen pemerintah bekerja sama untuk membangun kerukunan. Kerukunan dapat dibangun dari segi ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, supremasi hukum, dan tentu saja dari segi pengamalan kehidupan keagamaan di tingkat akar rumput.

Peran Penyuluh Agama dalam Merajut Kerukunan

Sejak kedatangan orang-orang Bali, Jawa, Bugis, Mandar, Kaili ke wilayah ini memang sudah terjalin kerukunan diantara mereka. Karena tidak pernah terjadi konflik apapun di daerah ini soal umat beragama. Maka para penyuluh menganggap diri tidak berperan langsung dalam hal kerukunan. Namun peran para penyuluh sebenarnya sangat besar tetapi terjadi secara tidak langsung. Penyuluh agama baik PNS maupun non-PNS adalah mereka yang setiap saat menjadi penceramah di semua even masyarakat. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, penyuluh agama senantiasa hadir dalam pembinaan keagamaan. Hal ini dapat diketahui dalam praktik upacara aqiqah, sunatan, pernikahan, sampai kematian, hampir dipastikan selalu mengundang penceramah (penyuluh).

Dengan demikian, penyuluh agama Islam senantiasa hadir di tengah masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan inilah sesungguhnya mereka berperan aktif membangun, membina, dan membimbing masyarakat. Hal ini juga terjadi di masyarakat Hindu dan Kristen, yang dilakukan penyuluh agama tersebut.

Penyuluh terkadang memiliki peran ganda, salah satunya selain berperan sebagai penyuluh agama juga aktif sebagai pengurus FKUB Kab. Mamuju Utara. Dengan peran ganda tersebut, tentunya akan mempermudah dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan. Berikut adalah keterangan

seorang penyuluh yang menjadi pengurus FKUB Tentang konflik atau ketegangan antar umat beragama di Mamuju Utara adalah :

“Bahwa Selama ini belum pernah terjadi konflik antar ummat beragama yang mengarah kepada sara’ atau persoalan-persoalan agama lainnya di kecamatan Pasang kayu pada khususnya dan kabupaten Mamuju Utara pada umumnya .” (Wawancara Penyuluh Anggota FKUB).

Sebagaimana kita tahu bersama, FKUB adalah lembaga yang dibuat untuk memperkuat kerukunan, memperkecil kemungkinan konflik, dan memfasilitas perdamaian antar setiap pihak yang berkelahi.

Masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan dengan baik. Meskipun setiap agama telah mengajarkan tentang pentingnya kedamaian dan keharmonisan, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Konflik jenis ini mempunyai dampak yang amat mendalam dan cenderung meluas. Bahkan implikasinya bisa sangat besar sehingga berisiko sosial, politik maupun ekonomi yang besar pula.

Pengertian konflik agama tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang dikenal dengan istilah konflik antar umat agama tetapi konflik juga sering terjadi antara umat dalam satu agama atau konflik intern umat agama. Munculnya berbagai konflik terkait dengan persoalan keagamaan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah: Pertama, pelecehan atau penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol agama, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Kedua, fanatisme agama yang sempit.

Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama

lainnya yang memiliki cara ritual ibadah dan paham agama yang berbeda. Dan yang ketiga adalah adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama. Konflik dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan dikomunikasi (pembodohan yang disengaja).

Pemberdayaan kelembagaan Islam untuk meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama perlu diprogramkan terencana dan berkelanjutan, yang diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa untuk suksesnya pembangunan nasional. Hal ini penting karena hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah dapat terus memupuk keharmonisan hubungan antar pemeluk agama melalui kelembagaan yang dikelola oleh negara maupun kelembagaan yang dikelola oleh berbagai agama yang ada di Indonesia, baik kelembagaan yang bersifat formal maupun non formal.

Sebagai penyuluh Islam yang berasal dari organisasi yang terkenal di Indonesia maka sangat wajar jika seluruh penyuluh yang ada punya wawasan kerukunan. Mereka memahami ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Inti ajaran yang membuat umat Islam harus mengayomi siapa saja. Tentu dengan batasan-batasan tidak boleh melanggar akidah umat Islam. Ada yang berbeda pendapatnya seorang penyuluh agama Islam tentang mengucapkan selamat natal dan hari raya kepada umat lain. Ada seorang penyuluh mengatakan bahwa tidak boleh mengucapkan selamat natal ada juga mengatakan boleh. Ini

berarti ada dua pendapat yang tidak sama. Yang mana rukun wawasannya? Dua-duanya bisa benar. Karena kedua pendapat ini hanya bicara pada masalah teologis bukan masalah sosial. Seluruh penyuluh agama Islam yang ada setuju bahwa menghargai agama lain diatur dalam Islam. Ayatnya; bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini menurut penyuluh Islam adalah pengaturan dan bolehnya ada agama lain di sekitar kita. Tetapi agama tidak boleh saling campur baur satu sama lain. Ada batasannya. Bagi penyuluh satu menganggap bahwa mengucapkan selamat natal adalah ajaran teologis, satunya lagi menganggap bukan. Tetapi dua-duanya setuju untuk saling menghargai dan itu yang paling penting tentunya.

Dalam lingkungan Kementerian Agama Mamuju Utara peranan penyuluh agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian Agama, dimana seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam menjadi tugas penyuluh Agama untuk memberi penerangan dan bimbingan. Sehingga sebagai ujung tombak ia dituntut agar ujung tombak itu benar-benar tajam, agar dapat mengenai sasaran yang diinginkan. Bahkan kini, Penyuluh agama sering berperan sebagai corong dari Kementerian agama dimana ia ditugaskan. Peranan inilah yang sering memposisikan penyuluh agama sebagai makhluk yang dianggap multi talenta. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam perlu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapan serta menguasai berbagai strategi, pendekatan, dan teknik penyuluhan, sehingga mampu dan siap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan betul-betul profesional.

Penyuluh Agama Islam Fungsional didalam melaksanakan tugasnya, dibekali

oleh surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak sebagai PNS diatur oleh undang-undang . Akan tetapi sebagai seorang muslim, tugas menyampaikan penyuluhan agama ini merupakan kewajiban setiap muslim, pria atau wanita, karenanya ia harus menyadari bahwa tugas suci ini harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan aktivitas penyuluhan tergantung pada rencana yang telah disusun oleh penyuluh, sebab dengan perencanaan yang baik penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi.

Sebagai seorang penyuluh Agama Islam yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan penyuluhan, dan berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Mamuju Utara. Penyuluh dituntut untuk mempersiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh obyek penyuluhan untuk dicarikan jalan penyelesaiannya, dan terakhir yang sering dilupakan adalah mengadakan pemantauan dan evaluasi.

Adapun kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh penyuluh adalah menerima konsultasi dari warga masyarakat yang bertanya tentang kerukunan umat beragama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat kota sampai desa. Tidak hanya itu, penyuluh berperan dalam pembangunan rumah ibadah, dan mensosialisasikan kerukunan antar agama agar tidak terdapat perselisihan antar umat beragama. Penyuluh juga berperan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang aliran-aliran Islam yang ada di Mamuju Utara, yaitu Jamaah tabligh, LDII, dan wahda Islamiyah sehingga tidak terjadi perselisihan dan konflik.

Penyuluh Hindu berasal dari aliran Hindu Dharma Siwa Sedante. Ini kelompok

yang dominan bahkan bisa dikatakan seluruh umat Hindu dari aliran ini. Kita semua pahami kalau aliran Hindu Dharma itu sangat mengajarkan kebaikan antar sesama. Menurut penyuluh Hindu, ada nama konsep dalam agama Hindu yang disebut *tap wam asi*, aku adalah kamu. Artinya, semua manusia itu sama. Di dalam diri kita ini berasal dari unsur yang serupa yaitu unsur yang berasal dari Sang Hyang Widi. Umat Hindu dimana-mana pasti punya sifat utama saling menghargai antar sesama makhluk Tuhan. Ada juga nama konsep dalam Hindu dinamakan Tri Hita Kirana, yakni hbungan kepada Tuhan, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada alam. Di dalam sini ajaran Hindu itu termuat ajaran untuk menghargai sesama manusia, siapapun dia, sukunya, agamanya, dan latar belakangnya.

Seluruh penyuluh agama Hindu Non PNS yang berjumlah 7 orang juga berasal dari aliran Siwa Sedante Hindu Dharma sama dengan penyuluh PNS-nya. Mereka adalah tokoh agama yang selama ini memimpin kegiatan ceramah agama yang ada di banjar-banjar dan pura. Mereka pastinya memiliki wawasan kerukunan yang sangat baik sehingga dengan demikian umat Hindu di Kab. Mamuju Utara diterima baik oleh warga sekitar. Mereka saling membantu untuk bekerja sama dalam memelihara kedamaian antar sesama warga.

Serangkaian dengan peningkatan kualitas kerja penyuluh agama Hindu dilingkungan kabupaten Mamuju Utara, kementerian agama memberikan pembinaan terkait dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas penyuluh agama Hindu serta peningkatan pelayanan terhadap umat hindu serta dapat memotivasi para penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada umat sesuai dengan tugas dan fungsi pokok penyuluh yaitu melaksanakan

penyuluhan dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membentuk budi pekerti yang luhur sebagai landasan hidup beragama.

Dengan memahami ajaran agama serta mampu mengamalkannya masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kehidupan beragama yang berkualitas. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan strategi yang baik dalam menyampaikan materi penyuluhan yaitu, mampu memilih metode, memilih materi dan persiapan yang baik. Penyuluh juga diharapkan mampu memberikan contoh dalam kehidupan bermasyarakat seperti membina kerukunan umat beragama dan mampu mewujudkan kerukunan interen umat beragama, antar umat beragama dan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga masalah pendataan umat, lembaga umat, pendataan pemangku sarati banten dan orang suci serta organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui jumlah rohaniawan hindu yang memiliki peran yang sangat utama dalam melaksanakan ajaran adat dan agama, sarati merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam yadnya, pendataan kelembagaan umat seperti sekehe santi, Sekehe gong yang merupakan suatu organisasi yang keanggotaannya bersifat sosial dimana melalui sekehe tersebut dapat meningkatkan srada dan bhakti umat. Dengan terdatanya seluruh komponen umat Hindu para penyuluh diharapkan mampu memberikan pembinaan secara merata dan menyeluruh kepada elemen umat hindu dikabupaten Mamuju Utara.

Peran penyuluh agama hindu menghadapi masalah yang ada di Mamuju Utara khususnya di Desa Mertajaya tentang pembangunan rumah ibadah umat kristiani adalah menjelaskan kepada umat hindu untuk

tetap menjalankan agama dengan baik dan benar tanpa harus mendengarkan dan memperhatikan apa yang diperbuat oleh orang lain karena jika menjalankan agama dengan baik dan benar sesuai dengan darma Insha Allah tidak akan ada masalah. Dan salah satu persyaratan agama hindu harus menjalani hubungan baik dengan agama lain.

Kegiatan rutin yang sering dilakukan penyuluh yaitu aktif memberikan ceramah agama, pembinaan keluarga pranik, pembinaan generasi muda, pembinaan kependidikan Hindu, pembinaan dan diskusi terhadap peran Tokoh Agama, Kepemangkuan, pembinaan lembaga-lembaga Hindu Mamuju Utara. Penyuluh agama hindu tidak hanya berperan memberikan penyuluhan kepada umat hindu tetapi juga memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat non hindu yang membutuhkan.

Tanggapan penyuluh terhadap kemunculan aliran Hare Krina adalah tidak menjadi masalah sepanjang aliran tersebut tidak mengganggu ketentraman dalam menjalankan ibadah kelompok lain, karena keyakinan adalah hak bagi setiap umat.

Sedangkan penyuluh Kristen berasal dari Gereja Toraja. Juga tentu memiliki wawasan kerukunan yang baik. Menurut penyuluh Kristen, intinya ajaran agama Kristen itu adalah kasih. Tidak terkait kepada umat Kristen secara internal saja tetapi juga mencakupi keseluruhan umat. Penyuluh Kristen mencontohkan Ibu Teresa di Kalkuta India adalah bentuk apa yang dimaksud dalam ajaran Kristen sebagai kasih. Dengan ajarannya yang berinti kasih, umat Kristiani bisa mengembangkan diri di tengah masyarakat muslim secara wajar. Penyuluh ini mengakui memang biasa ada dalam aliran Kristen kelompok yang disebut karismatik. Mereka memang kadang-kadang tidak bisa

bergaul dengan kelompok lain bahkan pula sesama umat Kristiani. Tetapi bersyukur karena aliran Karismatik belum berkembang di Kota Pasangkayu atau di Kab. Mamuju Utara secara umum.

Menurut keputusan Menteri Agama RI No. 164 Tahun 1996. Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka penyuluh agama kristen adalah pembimbing umat kristiani dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Sesuai dengan keputusan Menteri Agama tersebut, penyuluh agama memiliki peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melakukan ketertiban dunia, maka dengan itu, peran penyuluh dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yaitu sebagai pendidik, pemimpin, gembala, dan transformator.

Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam membangun kerukunan beragama peran penyuluh sangatlah penting dalam hal ini untuk memandu kerukunan umat beragama. Membina kerukunan umat beragama baik dilingkungan kristiani maupun agama-agama lain. Dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah ibadah tanpa memandang agama.

Melihat realita dan kejadian akhir-akhir ini khususnya di Mamuju Utara, adanya kasus penolakan pendirian rumah ibadah oleh warga di sekitar lokasi pendirian rumah ibadah tersebut peran penyuluh sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada umatnya untuk tidak mudah memberi jawaban dan

kesimpulan akan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat kristiani. Agar umat kristiani tetap semangat dalam menjalankan dan meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga tetap terjalin kerukunan antar umat beragama.

Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya sekedar dibidang keagamaan (kerohanian) tetapi juga meliputi aspek kehidupan jasmani, misalnya di bidang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penyuluh adalah orang tangguh dalam hidup rohani dan jasmani karena menjadi teladan yang mampu memberikan semangat kepada banyak orang untuk berbuat baik.

Kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh penyuluh, yaitu memandu kerukunan umat beragama, membuat laporan kegiatan, mengambil data-data rumah ibadah, jumlah pemeluk agama yang ada di Mamuju Utara, mengajar sekolah minggu atau memimpin ibadah rumah tangga.

PENUTUP

Berpijak dari penjelasan-penjelasan di atas terkait dengan hubungan umat beragama di Kabupaten Mamuju Utara, kemudian bagaimana pandangan penyuluh agama kaitannya dengan kerukunan, dan apa peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama di wilayah tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju Utara tergolong baik, hal ini dapat dilakukan hubungan beberapa organisasi keagamaan yang cukup harmonis. Kemudian juga adanya peran FKUB yang dalam memainkan perannya sebagai perekat kerukunan.

Selain itu, masyarakat dapat menerima berbagai suku lain masuk di wilayah ini. Namun demikian juga terdapat potensi yang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan umat beragama sebagai contoh adalah

pendirian rumah ibadah. Kedua, bahwa kerukunan beragama di Mamuju Utara dalam pandangan penyuluh dapat tercapai apabila seluruh komponen masyarakat saling mempercayai, menghargai, menghormati, dan dapat menerima perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Ketiga, kerukunan beragama yang terjalin pada masyarakat Mamuju Utara tidak terlepas juga dari peran penyuluh baik penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS (yang diperankan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat) dalam menjalin kerukunan.

Terkait peran penyuluh dalam meningkatkan kerukunan disarankan selain melakukan penyuluhan melalui forum-forum agama, juga perlu beradaptasi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Bagi pemerintah, perlu adanya kebijakan yang mengatur pembinaan kerukunan hidup umat beragama, misalnya mengenai kebijaksanaan penyiaran agama, pendirian dan penggunaan rumah ibadah, upacara hari besar keagamaan, hubungan antar agama dalam bidang pendidikan, perkawinan, penguburan jenazah, dan wadah musyawarah antarumat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mursyid. 2009. *Pemetaan kerukunan kehidupan beagama di berbagai daerah di Indonesia*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Jakarta.
- Arifin, M. 1999/2001. *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*. Intermedia. Jakarta.
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya* (tidak diterbitkan). Jakarta.
- Departemen Agama. 1982. *Pedoman dasar kerukunan hidup beragama*. Jakarta:

- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Departemen Agama. Jakarta.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 2000. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. Jakarta.
- Fauzi, Romzan dkk. 2014. *Membangun Harmoni dengan Kearifan Lokal: Model Pembinaan Kerukunan Umat Beragama bagi Penyuluh Agama*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. Semarang.
- Haris, Munawar. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol. 11; No. 01; 2017. Garut.
- Hasibuan, Muhammad Nuh. Tt. *Peran Penyuluh Agama Dalam Pemberdayaan Majelis Taklim Kaum Ibu Dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama*, Penyuluh Fungsional Agama pada Kementerian Agama Kota Padangsimpuan
- Kartanegara, Mulyadhi. 2005. *Islam dan Multikulturalisme: Sebuah Cermin Sejarah*. Dalam Baidhawiy, Zakiyuddin (ed.). *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: PSB UMS, 2005, h. 207-210.
- Kustini dan Koeswinarno. 2015. *Penyuluh Agama: Menuju Kerja Profesional*, Jurnal Analisa Volume 22 Nomor 2 Desember 2015. Semarang.
- Arifin, Muhammad. 1999. *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*, Intermedia. Jakarta.
- Mas'udi. 2012. *Basis Epistemologi Penyuluh Agama Islam (Menyelia Determinasi Kontradiktif Antara Penyuluh Dan Konselor)*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam Konseling Religi, Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2012.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2008. *Optimalisasi Pelayanan Keagamaan Departemen Agama*. Balai Litbang Agama. Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2010. *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Kawasan Timur Indonesia*. Balai Litbang Agama. Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2011. *Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Muallaf di Kawasan Timur Indonesia*. Balai Litbang Agama. Makassar.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2012. *Dakwah Keagamaan di Daerah Terpencil*. Balai Litbang Agama. Makassar.